

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pilar fundamental dalam pembangunan bangsa adalah Pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar warga negara, tetapi pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan generasi yang kritis, produktif dan berdaya saing tinggi, serta menjadi landasan kuat dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera dan inklusif (Yamin & Syahrir, 2020). Komitmen pemerintah Indonesia terhadap sektor pendidikan tercermin jelas dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4), yang menyatakan bahwa negara wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran yang besar ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan merata.

Pada praktiknya, pemerintah telah merancang berbagai program strategis untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Salah satu program utama adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023), dana BOS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kesuksesan pelaksanaan program Bantuan Operasional sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengatur dana serta seluruh instrumen yang terlibat dalam pelaksanaannya. Serta dengan

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mendukung kelangsungan operasional lembaga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi Pendidikan (Widyawati et al., 2019).

Sebagai dana publik yang dialokasikan langsung ke satuan pendidikan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Hal ini tercantum dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS harus didasarkan pada lima prinsip fundamental : “fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi”. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam menjamin keberhasilan program pendidikan nasional. Menurut Mardiasmo dalam Sine dkk. (2021), akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi tugas untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan apa yang dikerjakannya kepada pihak yang memberi kepercayaan. Sekolah sebagai institusi Pendidikan harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola dana publik. Hal ini memiliki peran penting dalam seluruh jenjang pendidikan, termasuk pada tingkat dasar yang merupakan fondasi sistem pendidikan nasional.

Akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar memberikan kontribusi langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sekolah yang menerapkan sistem akuntabilitas yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar operasional, seperti penyediaan alat tulis, perbaikan ruang kelas, dan insentif pendidik. Nurhayati et al., (2023) menyebutkan bahwa akuntabilitas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BOS dalam menunjang operasional sekolah. Pelaporan keuangan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang kuat berperan penting dalam menjaga dan

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas bagi siswa dan guru.

Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, implementasinya tidak selalu berjalan seideal yang direncanakan. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan struktural maupun kapasitas kelembagaan di tingkat satuan Pendidikan. Kompleksitas sistem pelaporan dan dokumentasi justru menambah beban administratif sekolah dasar. Sebagaimana dikemukakan dalam Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan di sekolah masih sering bersifat formalitas dan tidak efektif dalam mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. KPK menemukan bahwa sekitar 12 persen sekolah menyalahgunakan dana BOS dengan modus laporan fiktif, manipulasi dokumen, hingga penggelembungan biaya, sementara survei tahun sebelumnya mencatat 33 persen sekolah berpotensi melakukan korupsi karena lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana.

Hasil terbaru dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan yang sangat memprihatinkan terkait pengelolaan dana BOS. Data menunjukkan bahwa sekitar 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS dengan modus laporan fiktif, manipulasi dokumen, hingga penggelembungan biaya. Selain itu, survei menemukan bahwa sekitar 17% sekolah melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan

manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah. Temuan-temuan ini mencerminkan bahwa indikator kinerja pendidikan nasional, seperti efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana, serta responsibilitas layanan pendidikan belum tercapai sesuai target. (<https://aclc.kpk.go.id/>).

Temuan-temuan ini mencerminkan bahwa indikator kinerja pendidikan nasional, seperti efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana, serta responsibilitas layanan Pendidikan belum tercapai sesuai target. Hal ini terlihat dari berbagai hambatan implementasi seperti keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dalam pengelolaan, serta kesulitan sekolah dalam mengalokasikan dana sesuai kebutuhan prioritas pendidikan. Penelitian dari Syata et al., (2025) menunjukkan bahwa dampak dana BOS terhadap kualitas pendidikan masih belum efektif, karena dana tidak dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel. Kendati berbagai hambatan struktural masih mewarnai pengelola dana BOS di tingkat nasional, temuan tersebut juga dapat menegaskan bahwa tantangan akuntabilitas juga berpotensi terjadi di daerah lain, termasuk provinsi Bali

Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan capaian Pendidikan yang relatif baik pada beberapa indikator makro, namun tetap menghadapi tantangan tata kelola pendanaan Pendidikan di Tingkat satuan pendidikan dasar. Dari sisi pembiayaan, Bali Post (2023) melaporkan bahwa pada triwulan I tahun 2023, pagu BOS untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bali mencapai Rp100,5 miliar, dengan realisasi sekitar Rp50,24 miliar atau 50% dari pagu, di mana Rp41 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk jenjang sekolah dasar.

Tahun 2023, dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan secara umum Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan. Namun, hasil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menghadapi tantangan Akuntabilitas. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekitar 28% sekolah dasar di Bali mengalami keterlambatan pelaporan BOS karena kendala administrasi dan teknis penggunaan aplikasi ARKAS. Di Kota Denpasar, ditemukan realisasi belanja BOS yang melebihi pagu anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta adanya sisa dana BOS yang mengendap dan belum diperhitungkan pada penyaluran periode berikutnya. (BPK RI Perwakilan Bali, 2023). Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam pengendalian internal dan perencanaan keuangan sekolah, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Fenomena serupa juga terlihat di Kabupaten Jembrana, yang menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun skalanya berbeda dengan yang terjadi di Kota Denpasar, Jembrana tetap menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Pada tahun 2025, data resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan provinsi Bali memiliki sebanyak 2.517 sekolah dasar (SD), dengan Kabupaten Jembrana mengelola sejumlah sekolah dengan berbagai tantangan karakteristik geografis dan administratif.

Tabel 1 1
Besaran Dana BOS per Kabupaten

No	Nama Kabupaten	Jumlah Dana BOS	Siswa	Satuan Pendidikan	Perseentase Per Siswa	Perseentase Per Sekolah
1	Kabupaten Bangli	Rp 169.107.790.000,00	148262	847	Rp 1.140.601,03	Rp 199.655.005,90
2	Kabupaten Jembrana	Rp 177.979.200.000,00	144055	822	Rp 1.235.494,78	Rp 216.519.708,03
3	Kabupaten Klungkung	Rp 143.416.790.000,00	133479	752	Rp 1.074.452,09	Rp 190.713.816,49
4	Kabupaten Buleleng	Rp 573.501.360.000,00	488874	2503	Rp 1.173.106,69	Rp 229.125.593,29
5	Kabupaten Karangasem	Rp 344.671.640.000,00	299375	1841	Rp 1.151.304,02	Rp 187.219.793,59
6	Kabupaten Badung	Rp 478.310.060.000,00	390529	1531	Rp 1.224.774,75	Rp 312.416.760,29
7	Kabupaten Gianyar	Rp 361.371.170.000,00	323127	1490	Rp 1.118.356,47	Rp 242.530.986,58
8	Kabupaten Tabanan	Rp 257.083.800.000,00	215093	1306	Rp 1.195.221,60	Rp 196.848.238,90
9	Kota Denpasar	Rp 582.496.680.000,00	509706	1265	Rp 1.142.809,15	Rp 460.471.683,79

Sumber : Data Diolah,2025

Kabupaten Jembrana menunjukkan kondisi kontradiktif dalam distribusi dana BOS. Meskipun besaran dana BOS per siswa tergolong relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Bali, hal ini lebih disebabkan oleh jumlah siswa yang lebih sedikit, bukan karena adanya alokasi dana yang lebih besar. Sebaliknya, jika ditinjau dari besaran dana BOS per satuan pendidikan, Jembrana justru menempati posisi rendah dibandingkan kabupaten besar lain seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Situasi ini mengisyaratkan bahwa keterbatasan dukungan dana BOS tidak hanya menjadi isu pada level kabupaten, tetapi juga tercermin dalam distribusi internal wilayah, yang pada praktiknya dapat menimbulkan perbedaan kapasitas pengelolaan dan tanggung jawab pelaporan antar wilayah administratif di dalam Kabupaten Jembrana.

Tabel 1 2
Proporsi Pagu Dana BOS per Kecamatan Jembrana (2020-2024)

NAMA KECAMATAN	TOTAL PAGU (Miliar Rp)	Proporsi (%)	Ranking
Kecamatan Negara	39.750.257.737	29,30%	1
Kecamatan Mendoyo	29.308.457.461	21,60%	2
Kecamatan Jembrana	27.122.434.088	20,00%	3
Kecamatan Melaya	26.875.166.346	19,80%	4
Kecamatan Pekutatan	12.582.153.864	9,30%	5
TOTAL	135.638.469.496	100,00%	

Sumber : Dinas Pendidikan Jembrana (2026)

Gambaran mengenai perbedaan kapasitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Jembrana dapat dilihat melalui pola distribusi dana antar kecamatan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana yang telah diolah, total pagu Dana BOS selama periode 2020–2024 mencapai Rp135,64 miliar dengan jumlah alokasi yang berbeda pada setiap wilayah. Kecamatan Negara menjadi wilayah dengan penerimaan Dana BOS terbesar, yaitu sebesar 29,3% atau sekitar Rp39,75 miliar. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Mendoyo sebesar 21,6% (Rp29,31 miliar), Kecamatan Jembrana sebesar 20,0% (Rp27,12 miliar), Kecamatan Melaya sebesar 19,8% (Rp26,88 miliar), dan Kecamatan Pekutatan dengan alokasi terendah sebesar 9,3% (Rp12,58 miliar). Perbedaan alokasi tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki kebutuhan dan karakteristik pengelolaan Dana BOS yang tidak sama.

Variasi distribusi Dana BOS tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang diterima sekolah, tetapi juga memengaruhi tingkat kompleksitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada masing-masing satuan pendidikan. Semakin besar dana yang dikelola, maka semakin besar pula tanggung jawab

sekolah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbedaan kuantitatif dalam alokasi dana berpotensi diikuti oleh variasi praktik pengelolaan di lapangan.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap fenomena tersebut, diperlukan gambaran empiris mengenai bagaimana Dana BOS dikelola pada masing-masing sekolah di setiap kecamatan. Oleh karena itu, dilakukan survei awal melalui wawancara pada lima sekolah dasar negeri yang mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Diperoleh gambaran bahwa pengelolaan Dana BOS pada dasarnya telah mengikuti alur yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dimulai dari identifikasi kebutuhan sekolah, penyusunan RKAS melalui ARKAS, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi praktik pengelolaan di setiap sekolah, khususnya terkait pihak yang terlibat dalam pengelolaan, tingkat kompetensi pengelola, mekanisme transparansi, pemanfaatan aplikasi ARKAS, serta respons sekolah terhadap keterlambatan penyaluran dana. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana BOS di lapangan tidak sepenuhnya seragam, meskipun berada dalam regulasi yang sama. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai variasi tersebut, berikut disajikan ringkasan hasil wawancara survei awal pada lima sekolah dasar negeri di Kabupaten Jember dalam bentuk tabel komparatif.

Tabel 1.3

Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Survei Awal dan Kaitannya dengan Akuntabilitas

No	Aspek Pengelolaan Dana BOS	Temuan Survei Awal	Permasalahan Akuntabilitas
1	Transparansi penggunaan dana BOS	Informasi penggunaan dana belum sepenuhnya diketahui oleh pihak terkait	Rendahnya keterbukaan informasi publik
2	Partisipasi dalam perencanaan anggaran	Penyusunan rencana penggunaan dana belum melibatkan seluruh pihak	Pengambilan keputusan belum sepenuhnya transparan
3	Pelaporan penggunaan dana BOS	Pelaporan masih berorientasi administratif	Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum optimal
4	Pengawasan pengelolaan dana BOS	Pengawasan internal masih perlu diperkuat	Risiko kesalahan dan penyimpangan meningkat
5	Pemanfaatan aplikasi ARKAS	Penggunaan sistem belum optimal	Efektivitas pengendalian dan pelaporan belum maksimal

Sumber : Hasil wawancara survei awal, diolah peneliti (2026)

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan dana BOS tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menggambarkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas publik. Permasalahan seperti rendahnya keterbukaan informasi, keterbatasan partisipasi pihak terkait, serta belum optimalnya pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban sekolah sebagai pengelola dana publik dengan praktik pengelolaan yang terjadi.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya kasus penyalahgunaan Dana BOS yang sempat menjadi perhatian publik di SDN 1 Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, pada tahun 2020. Berdasarkan laporan sejumlah guru dan hasil klarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana, ditemukan adanya

penggunaan Dana BOS reguler yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan sekolah. Permasalahan tersebut meliputi adanya pos anggaran fiktif, seperti honor kegiatan ekstrakurikuler dan biaya perawatan sarana seni yang pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan. Nilai dana yang disalahgunakan diperkirakan mencapai sekitar Rp10 juta. Atas permasalahan tersebut, kepala sekolah terkait dikenai sanksi administratif dan diwajibkan mengembalikan dana ke kas sekolah.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan Dana BOS tidak hanya berkaitan dengan kesalahan administratif, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menuntut adanya kewajiban dari pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui proses yang transparan, tepat, dan dapat diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Namun, pada kasus SDN 1 Sangkaragung, adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta pengawasan internal belum berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi pengelolaan Dana BOS belum cukup untuk menjamin terciptanya akuntabilitas apabila tidak didukung oleh faktor internal sekolah. Kompetensi pengelola menjadi aspek penting karena pengelola yang memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai akan lebih mampu menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dana BOS sesuai ketentuan. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi keuangan dan pemanfaatan sistem pendukung seperti aplikasi ARKAS

juga diperlukan untuk meningkatkan keterbukaan, mengurangi risiko kesalahan pengelolaan, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Dengan demikian, kasus penyalahgunaan Dana BOS di SDN 1 Sangkaragung menjadi gambaran nyata mengenai pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa akuntabilitas Dana BOS dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kemampuan pengelola, transparansi pengelolaan keuangan, maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi pengelola, transparansi, dan pemanfaatan aplikasi ARKAS terhadap akuntabilitas Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jembrana.

(<https://tinyurl.com/BOSJembrana2020>, <https://tinyurl.com/DinasJembranaBOS>)

Data tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk menelaah lebih dalam hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam konteks Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan fenomena tersebut, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Kompetensi pengelola dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jembrana belum optimal, terutama dalam penguasaan akuntansi dasar dan sistem pelaporan berbasis digital.
2. Transparansi penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka kepada pemangku kepentingan sekolah.

3. Pemanfaatan aplikasi ARKAS belum merata dan masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan teknis dalam pengoperasiannya.
4. Akuntabilitas pelaporan dana BOS masih menghadapi kendala dalam hal keterlambatan dan ketepatan laporan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS dengan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Sopian & Asqolani (2022) memaparkan indikator akuntabilitas dapat diindikasikan dari penyebaran informasi secara lengkap dan akurat atas kebijakan yang telah diambil. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nuriyawati (2025) dimana penelitian ini secara simultan, akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas Pendidikan sebesar 52,7% yang dimana dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kualitas Pendidikan.

Hasil penelitian dari Widyastuti (2022) menyatakan Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dalam memediasi hubungan antara good governance dan pengelolaan Dana BOS, dengan adanya kompetensi SDM pihak sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dengan mengarahkan kemampuan serta keahliannya untuk dapat mengefektifkan pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandari,dkk (2024) yang dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan dana BOS. Dan dalam penelitian Anirta,dkk (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya,

penelitian yang dilakukan Safitri (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Sementara itu, hasil penelitian dari Sartika, dkk (2025) menyatakan transparansi yang tinggi mendorong akuntabilitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lainnya yang memiliki variabel serupa Simanjuntak, dkk (2024) dan Rachmawati (2023). Namun hasil penelitian Muti'ah, dkk (2024) menyatakan meski tidak negatif secara statistik, transparansi tidak meningkatkan akuntabilitas.

Penyaluran dana BOS dari pemerintah tidak terlepas dari pengelolaan data, baik data siswa yang terdaftar maupun data kas masuk dan keluar yang dikelola Kementerian Pendidikan melalui aplikasi resmi. Salah satu aplikasi utama adalah ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), sistem berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS secara digital dan real-time. Berdasarkan hasil penelitian Ardhiani dan Ayu (2024), penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) telah terbukti membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dalam pengelolaan Dana BOS. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lainnya yang memiliki variabel serupa Yanti (2022), ridho, dkk (2021) dan Anshari (2022). Namun hasil penelitian Adnyani & Astawa (2023) memberikan hasil sistem ARKAS dianggap akuntabel dan transparan, tetapi mengalami kendala operasional seperti sistem error, menu tidak sesuai, kebutuhan, dan human error. Dibutuhkan

refresh sistem, koneksi internet stabil, atau pelaporan ke operator MARKAS apabila terjadi masalah. Meskipun tidak menunjukkan pengaruh negatif langsung, hambatan-hambatan tersebut bisa menghambat efektivitas akuntabilitas, terutama jika sistem bermasalah terus-menerus.

Penelitian ini memakai **Teori Keagenan** sebagai landasan utama. Secara sederhana, teori ini menggambarkan hubungan antara *principal* (pihak pemberi amanah, misalnya pemerintah atau masyarakat) dan *agent* (pihak pelaksana, misalnya kepala sekolah atau bendahara) yang mengelola dana publik. Perbedaan tujuan, insentif, dan ketersediaan informasi antara kedua pihak dapat menimbulkan masalah keagenan seperti moral hazard dan adverse selection yang menurunkan akuntabilitas (K. M. Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, kompetensi pengelola berfungsi mengurangi biaya keagenan karena meningkatkan kemampuan agen dalam pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan keuangan sehingga meminimalkan kesalahan dan asimetri informasi (Giovani & Marvilianti Dewi, 2025). Transparansi berperan sebagai mekanisme pengawasan; dengan keterbukaan informasi, peluang penyalahgunaan berkurang dan tujuan antara principal dan agent menjadi lebih selaras (Eisenhardt, 1989; Schillemans, 2015). Sementara itu, pemanfaatan aplikasi, khususnya ARKAS, bertindak sebagai alat kontrol teknis yang menurunkan biaya monitoring dan memudahkan akses data secara real time sehingga mempermudah verifikasi penggunaan dana oleh pihak pemberi amanah (Peraturan Kementerian Pendidikan, 2022). Dengan demikian, peningkatan kompetensi, transparansi, dan pemanfaatan ARKAS secara bersama-sama diperkirakan akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah dasar.

Penelitian ini menawarkan kebaruan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Jumiari & Sujana (2024) mengenai Pemahaman Standar Akuntansi, Aksesibilitas, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini akan menguji keterkaitan antara aspek personel, khususnya kompetensi pengelola (SDM), serta penerapan teknologi informasi (ARKAS) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Penelitian sebelumnya oleh Jumiari (2022) menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan akuntabilitas, namun tidak secara khusus memasukkan variabel kompetensi pengelola maupun transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliani dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS, tetapi belum menyoroti peran teknologi informasi berbasis aplikasi seperti ARKAS. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (research gap) pada variabel independen yang digunakan, yaitu mengombinasikan kompetensi pengelola, transparansi, dan ARKAS, serta perbedaan lokasi penelitian dengan fokus pada Kabupaten Jemberana sebagai unit analisis.

Berdasarkan kajian terdahulu, terlihat adanya inkonsistensi temuan pada hubungan kompetensi pengelola, transparansi, dan penggunaan ARKAS terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Kompetensi pengelola terbukti signifikan meningkatkan akuntabilitas (Wahyuni & Wahyuni, 2024), namun indikator kompetensi yang digunakan cenderung terbatas pada aspek pendidikan formal. Transparansi juga menunjukkan hasil berbeda: Isnara & Mustoffa (2023)

menemukan transparansi tidak optimal karena pelibatan stakeholder minim, sedangkan literatur tata kelola publik justru menekankan transparansi sebagai fondasi akuntabilitas. Demikian pula, hasil penelitian terkait ARKAS tidak konsisten; di Buleleng, ARKAS diakui mendukung akuntabilitas namun masih terkendala aspek teknis (Adnyani & Astawa, 2023), sementara di Makassar ARKAS terbukti signifikan meningkatkan akuntabilitas (Wahyuni dkk., 2023). Kondisi tersebut menegaskan adanya research gap, yaitu perlunya penelitian yang secara simultan menguji pengaruh kompetensi pengelola, transparansi, dan penggunaan ARKAS terhadap akuntabilitas dana BOS, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Jembrana yang hingga kini belum banyak mendapat perhatian akademik.

Sehingga dengan memperhatikan fenomena, permasalahan dan penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola, Transparansi dan Penerapan Aplikasi ARKAS Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jembrana”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul :

1. Terdapatnya kendala dalam ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS ke sekolah
2. Kurangnya waktu dalam penyusunan laporan terkait pengelolaan dana BOS

3. Kurangnya kompetensi keuangan pada pengelola keuangan dana BOS
4. Kurang melibatkan partisipasi orang tua/Masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS
5. Pemanfaatan ARKAS belum merata disetiap daerahnya
6. Kurangnya akses yang diberikan kepada pihak internal terkait laporan keuangan dana BOS
7. Kesulitan dalam mengatur skala prioritas atas dana yang didapatkan

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Jember.
2. Variabel independen yang diteliti meliputi kompetensi pengelola, transparansi, dan pemanfaatan Pemanfaatan Aplikasi ARKAS sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas Dana BOS.
3. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada kepala sekolah dan bendahara BOS, serta wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat hasil temuan.
4. Penelitian ini dibatasi pada tahun anggaran 2024–2025, sesuai periode implementasi ARKAS tahap terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi pengelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana?
2. Apakah transparansi pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana?
3. Apakah pemanfaatan Aplikasi ARKAS berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi pengelola terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana.
2. Menganalisis pengaruh transparansi pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana.
3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan ARKAS terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang

berkaitan dengan tata kelola keuangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitaian ini bisa jadi masukan berharga buat Kemdikbudristek dalam mengevaluasi program dana BOS secara nasional, terutama soal efektivitas ARKAS di daerah terpencil seperti beberapa wilayah di Jembaran. Temuan tentang pengaruh kompetensi pengelola dan transparansi bisa membantu menyempurnakan pedoman teknis atau pelatihan online ARKAS, sehingga pengelolaan dan BOS lebih merata di seluruh Indonesia. Selain itum rekomendasi dari studi ini dapat memperkuat monitoring pusat terhadap akuntabilitas sekolah dasar negeri, mengurangi resiko penyimpangan seperti yang terungkan dalam survey

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana BOS, khususnya dalam hal penempatan SDM yang kompeten, penguatan sistem pelaporan, serta pengembangan pelatihan ARKAS di wilayah Kabupaten Jembrana. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan tata kelola Dana BOS berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel.

c. Bagi Sekolah Dasar

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman praktis kepada pihak sekolah mengenai pentingnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan, pentingnya menyusun laporan yang transparan dan akurat, serta urgensi memaksimalkan penggunaan aplikasi ARKAS sebagai sarana pengelolaan keuangan yang efisien. Sekolah juga dapat memperoleh rekomendasi untuk memperbaiki manajemen internal dan meningkatkan peran serta stakeholder.

d. Bagi Masyarakat dan Komite Sekolah

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya orang tua siswa dan komite sekolah, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan titik awal untuk kajian lanjutan yang membahas isu akuntabilitas keuangan pendidikan dengan pendekatan empiris. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang relevan atau menerapkan model ini pada jenjang pendidikan yang berbeda maupun wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam.